

PENGARUH INDEPENDENSI, KEAHLIAN AUDIT DAN LINGKUP AUDIT TERHADAP OPINI AUDIT (Studi Kasus BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat)

Camelia L. Numberi ^{1*}, Anik Wuriyashih ², Alvany T. Wanma ³, Yomima D. Salamuk ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Universitas Papua, Manokwari

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of independence, audit expertise, and audit scope on the provision of audit opinion of financial statements to BPK RI auditors representative of West Papua. The population in this study is all BPK RI auditors representing of West Papua, totaling 42 people. Sampling technique used in this study is saturated sample technique. While, the data analysis was handled by multiple regression analysis. The results of the study indicate that independence, audit expertise, and audit scope influence the auditor's considerations in giving an audit opinion on financial statements. Auditors who have high independence will definitely produce a good audit opinion, meaning that the auditor is not influenced and bound by any party, so that the audit opinion given is entirely in the public interest. Auditors who have high audit expertise will produce better audit opinions because the auditor will apply their audit competence in analyzing and explaining the contents of a financial report that produce precise and accurate so audit opinion also not misleading for all financial statements users. audit scope limitations will affect the provision of audit opinion on financial statements because the auditor cannot work freely in finding audit evidences.

Keywords: Audit Expertise, Audit Scope, Audit Opinion, Independency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Independensi, keahlian audit, dan lingkup audit terhadap Opini Audit atas Laporan Keuangan pada auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat. Populasi dalam penelitian adalah seluruh auditor BPK RI perwakilan papua barat yang berjumlah 42 orang. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel jenuh. Untuk analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi, keahlian audit, dan lingkup audit berpengaruh terhadap pertimbangan auditor dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan. Auditor yang memiliki Independensi yang tinggi pasti menghasilkan opini audit yang baik artinya auditor tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak terikat dengan pihak manapun juga sehingga opini audit yang diberikan sepenuhnya untuk kepentingan umum. Auditor yang memiliki keahlian audit yang tinggi akan menghasilkan opini audit yang jauh lebih baik karna dalam menjalankan tugasnya auditor akan menerapkan keahlian audit yang dimilikinya dalam menganalisis dan menjelaskan isi dalam sebuah laporan keuangan sehingga opini audit yang dihasilkan akan lebih tepat dan akurat serta tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan. Pembatasan lingkup audit akan mempengaruhi pada pemberian opini audit atas laporan keuangan karena auditor tidak dapat bekerja dengan leluarsa dalam menemukan bukti-bukti audit.

Kata Kunci: Keahlian Audit, Lingkup Audit, Opini Audit, Independensi

PENDAHULUAN

Roda pemerintahan suatu daerah dapat berjalan dengan baik jika pemerintah daerah tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya dengan memegang prinsip akuntabilitas dan transparasi. Hal ini tidak lain demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. Mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah maka pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang mana pemerintah daerah didorong untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan daya saing daerah dengan mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Republik Indonesia.

Dengan diimplementasikannya otonomi daerah maka pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi diwajibkan menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban aktivitas keuangannya. Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi yang menjadi faktor pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan oleh para stakeholder terkait. Untuk pemerintah daerah kemudian dikenal dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Demi menjaga kepercayaan para pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka diperlukan sebuah audit oleh auditor eksternal yang independent. Sesuai dengan UU No.15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan tersebut diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN adalah standar yang ditetapkan dalam peraturan BPK No. 01 Tahun 2007, dengan standar ini nilai kredibilitas informasi yang diperoleh dari entitas terjaga.

Auditor BPK merupakan auditor eksternal yang dianggap memiliki independensi dan kompetensi dalam mengaudit laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) di Indonesia. Menurut Mulyadi (2011), independensi sebagai keadaan bebas dari pengaruh, tidak dipengaruhi oleh pihak lain, dan tidak bergantung pada orang lain. Auditor yang independen tentunya memiliki pertimbangan dan pendapat sendiri menurut fakta-fakta yang ditemukan dilapangan pada saat audit dilaksanakan, pendapat auditor dianggap tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh para pihak – pihak yang berasal dari luar. Selain auditor dituntut memiliki independensi dalam melaksanakan tugasnya, standar umum pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (SA seksi 210 dalam SPAP). Demikian pula hal ini tertuang dalam UU No.34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan, hal tersebut telah memberikan syarat terpendidikan formal sebagai auditor. Pendidikan formal dibidang akuntansi serta pendidikan

profesi yang berkelanjutan tersebut berguna untuk membuat para auditor memiliki keahlian dan memiliki kualifikasi dalam melakukan pekerjaannya. Selain dua hal tersebut, lingkup audit adalah hal penting lain yang harus diperhatikan. Dalam SKPN lingkup audit ialah batas pemeriksaan dimana audit yang dilakukan harus terkait langsung dengan tujuan audit tersebut. Pembatasan dimaksud dapat bersumber dari klien ataupun oleh keadaan, misalnya batas waktu pelaksanaan audit, kegagalan mengumpulkan bukti yang cukup, kurangnya catatan akuntansi yang mengharuskan auditor membuat pengecualian dalam memberikan opini.

Dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pasal 1 ayat 11 telah menjelaskan bahwa opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini audit merupakan tanggung jawab seorang auditor, dimana berkaitan dengan profesionalisme akuntan dalam memberikan pendapatnya terhadap kewajaran suatu laporan keuangan. Sementara itu, ada empat jenis opini yang dapat di berikan oleh pemeriksa yaitu opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), tidak wajar (*adversed opinion*), dan pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

Laporan audit sebagai *output* dari sebuah proses audit digunakan oleh auditor untuk menyampaikan opininya kepada para pemakai laporan keuangan, opini tersebut dapat dijadikan petunjuk oleh pengguna laporan keuangan dalam membaca sebuah laporan keuangan (Arens *et al.*, 2008). Laporan audit merupakan tanggung jawab auditor karena didalam laporan tersebut diungkapkan berbagai temuan-temuan yang diperoleh seorang auditor selama menjalankan tugasnya. Namun ada saja kasus-kasus yang telah terjadi menyebabkan independensi dan kompetensi seorang auditor di pertanyakan kembali. Contoh kasus seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bupati Ade Yasim yang diduga telah menuap auditor BPK perwakilan Jawa Barat dengan nilai total Rp 1,9 miliar untuk mengkondisikan hasil audit laporan keuangan pemerintah daerah 2021. Dengan hasil audit *real* mendapat status *disclaimer* diubah menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP (sumber: www.mediaindonesia.com). Hal ini tentunya membuat citra semu terhadap opini WTP yang dibuat kabur oleh tindakan auditor yang tidak independen dalam melaksanakan tugasnya. Padahal UU No.5 Tahun 2006 tentang BPK telah menyebutkan secara jelas tentang fungsi BPK sebagai lembaga diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Meski jelas aturan yang harus dipatuhi oleh seorang auditor namun kenyataannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam praktek audit tersebut. Di era ini, masyarakat dengan mudah dapat mengakses informasi dan mengetahui kasus-kasus pelanggaran kode etik para auditor sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesionalisme seorang auditor BPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang auditor yang independen.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori atribusi mempelajari bagaimana proses seseorang mengimplementasikan suatu peristiwa tentang alasannya terhadap perilakunya. Teori atribusi merupakan teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) berisi argumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh gabungan antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, misalnya kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Suartana, 2010).

Teori atribusi digunakan untuk mengetahui perilaku auditor dalam memberikan opini audit. Teori atribusi dapat menjelaskan perilaku seorang yang ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal (*internal forces*) seperti kemampuan atau usaha yang berasal dari dalam diri seseorang dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar seperti kesulitan dalam pekerjaan. Untuk mendukung penelitian ini, maka variabel-variabel dapat mempengaruhi ketepatan pemberian opini auditor yaitu independensi dan keahlian audit yang merupakan kekuatan internal seorang auditor serta faktor dalam lingkup audit yang dapat dipengaruhi oleh pihak luar akan digunakan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian opini audit.

Auditing merupakan proses sistematis yang berasal dari objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi dalam meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Konrath, 2005). Menurut Mulyadi (2011), auditing adalah suatu proses mengenai sistematika untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada yang berkepentingan.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah informasi yang butuhkan untuk membantu *stakeholders* dalam mengambil keputusan sosial, politik, dan ekonomi. Keputusan akan informasi laporan keuangan lebih berkualitas (Mahmudi, 2010). Laporan keuangan yang seharusnya dibutuhkan harus sesuai dengan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterima secara umum atau *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP). Berbeda menurut peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010, pengertian laporan keuangan adalah “ Laporan keuangan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dicapai oleh suatu entitas pelaporan”. Secara umum tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, menurut Mardiasmo (2004) adalah kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and* 135

stewardship). Akuntabilitas dan pelaporan (*accounting and retrospective reporting*), perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*), kelangsungan organisasi (*viability*), hubungan masyarakat (*publik relation*) dan sumber fakta dan gambar (*souce of fact and figures*).

Hasil Opini Audit

UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI memberikan empat opini, yaitu: pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), pendapat tidak wajar (*adverse opinion*), dan peryataan menolak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*). Dalam SPAP (SA 700 dan SA 705) menjelaskan bahwa ada dua bentuk opini audit yaitu: opini tanpa modifikasi dan opini modifikasi. Opini tanpa modifikasi adalah opini yang diberikan oleh auditor, ketika menyimpulkan bahwa laporan keuangan telah disusun dalam semua hal secara material dan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Opini modifikasi merupakan opini dalam laporan auditor ketika auditor menyimpulkan bahwa berdasarkan bukti audit yang diperoleh laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan penyajian material atau auditor tidak dapat memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk menyimpulkan laporan keunban secara keseluruhan bebas dari salah penyajian material.

Standar Pemeriksaan

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai salah satu pedoman pelaksanaan tugas dalam skala pemeriksaan. SPKN juga ditetapkan menjadi salah satu peraturan BPK No.01 Tahun 2007 sebagai amanat UU yang berlaku. (1) PSP No.01 tentang Standar Umum, (2) PSP No.02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, (3) PSP No.03 tentang Standar Pelaporan Keuangan, (04) No.04 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Kinerja, (5) PSP No.05 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Kinerja, (06) PSP No.06 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dan (07) PSP No.07 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Independensi

Independensi adalah keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi dan Puradireja, 2002). Sesuai standar umum kedua yang mengatur dan mengharuskan bahwa dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Seorang auditor tidak dibenarkan memilih kepada kepentingan siapa pun. Auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan fakta bahwa dia independen, namun ia harus pula menghindari keadaan yang dapat menyebabkan pihak luar meragukan sikap independensinya. Oleh karena itu, tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu: (1) independensi dalam fakta, (2) independensi dalam penampilan, (3) independensi dari sudut keahliannya.

Keahlian Audit

Keahlian audit antara lain mengenai pemeriksaan maupun pengusaan masalah yang diperiksanya ataupun pengetahuan yang dapat menunjang tugas pemeriksaan. Keahlian tersebut meliputi: merencanakan pemeriksaan, menyusun Program kerja pemeriksaan (PKP), melaksanakan program kerja pemeriksaan, menyusun kertas kerja pemeriksaan (KKP), menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP), mendistribusikan laporan hasil pemeriksaan, dan memonitor tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) (Jafaar, 2005). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Mayangsari (2003), mengemukakan bahwa komponen keahlian auditor di Indonesia adalah sebagai berikut: (1) komponen pengetahuan, seperti pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur dan pengalaman, dan (2) ciri-ciri psikologi, seperti kemampuan berkomunikasi, kreativitas serta keammpuan bekerja sama dengan orang lain.

Lingkup Audit

Lingkup pemeriksaan adalah batasan pemeriksaan dan harus terkait langsung bersama dengan tujuan pemeriksaan. Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidakcukupan catatan akuntansi yang mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat (SKPN, 2007). Menurut Arens *et al.* (2008), mengemukakan bahwa ada dua penyebab utama pembatasan ruang lingkup audit: (1) pembatasan oleh klien, (2) pembatasan yang disebabkan oleh situasi diluar kendali klien atau auditor.

Pengembangan Hipotesis

Auditor yang memiliki independensi yang tinggi pasti menghasilkan opini audit yang baik artinya auditor tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak terikat dengan pihak manapun juga sehingga opini audit yang diberikan sepenuhnya untuk kepentingan umum. Auditor yang tidak Independen tentu tidak memiliki kejujuran dalam dirinya dalam mempertimbangkan fakta, dapat memihak pada suatu kepentingan tertentu. Sehingga seorang auditor yang baik adalah auditor yang memiliki Independen. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Unisa (2015), Siregar (2012) dan Hasyim (2013), memberikan hasil penelitian bahwa independensi, keahlian audit, dan lingkup audit berpengaruh terhadap pemberian opini audit atas laporan keuangan sedangkan pemeriksaan internal tidak berpengaruh atas pemberian opini audit atas laporan keuangan

H₁: Independensi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini audit atas laporan keuangan.

Seorang auditor memiliki kualifikasi tertentu dalam memahami kriteria yang digunakan serta memiliki keahlian yang baik agar mengetahui tipe dan banyaknya bukti-bukti audit yang harus

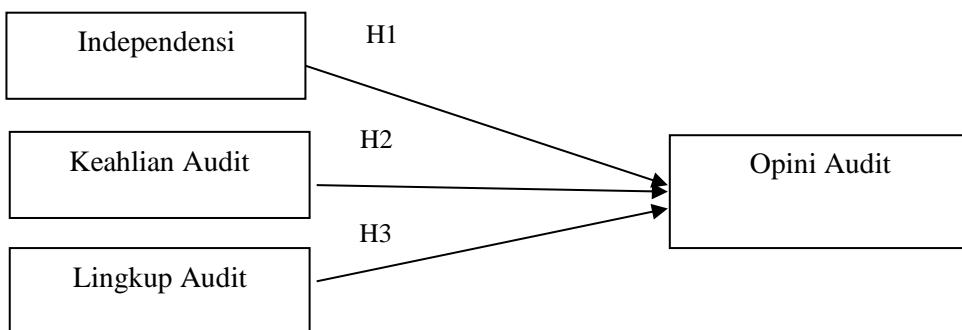
dikumpulkan untuk mencapai kesimpulan yang tepat setelah bukti-bukti audit tersebut selesai diuji (Arens et al, 2008). Auditor harus menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cakup dalam praktik akuntansi dan teknik auditing. Penelitian yang dilakukan Unisa (2015), menunjukan bahwa keahlian audit berpengaruh terdapat hasil opini audit. Menurut Unisa (2015), auditor yang memiliki keahlian yang tinggi akan menghasilkan opini yang baik. Dari penjelasan maka dari itu terbentuknya hipotesis:

H₂ : Keahlian audit berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini audit atas laporan keuangan.

Pembatasan terhadap lingkup audit, baik yang dikenakan oleh klien maupun oleh keadaan, seperti waktu pelaksanaan audit, kegagalan memperoleh bukti kompeten yang cukup, atau ketidak cukupan catatan akuntansi mengharuskan auditor memberikan pengecualian didalam pendapatannya atau peryataan tidak memberikan pendapat (SPKN,2007). Hasyim (2013) menunjukan bahwa lingkup audit berpengaruh positif signifikan terhadap hasil opini audit. Menurutnya pembatasan terhadap lingkup audit dapat mempengaruhi kualitas opini audit. Dari penjelasan tersebut maka terbentuklah hipotesis:

H₃ : Lingkup audit berpengaruh terhadap pertimbangan pemberian opini audit atas laporan keuangan.

Model Penelitian



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat sebanyak 42 orang. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *non probability sampling* (teknik sampel jenuh) dimana sampel yang diperoleh yaitu seluruh auditor eksternal BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat yang berjumlah 42 orang.

Tabel 1 Sampel dan Tingkat Pengembalian Kuisioner

Keterangan	Jumlah Kuisioner
Kuisioner yang disebarluaskan	42
Kuisioner yang kembali	42
Kuisioner yang datanya tidak lengkap	7
Kuisioner yang dapat diolah	35

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu membagikan kuisioner yang diisi langsung oleh para auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat berjumlah 42 orang. Penelitian ini menggunakan Skala Likert dengan skor 1 sampai dengan 5 menurut kriteria : Sangat Tidak Setuju (Skor 1), Tidak Setuju (Skor 2), Ragu-Ragu (Skor 3), Setuju (Skor 4), dan Sangat Setuju (Skor 5).

Metode Analisis Data

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Opini Audit
 α = Konstanta
b = Koefisien Regresi
X1 = Independensi
X2 = Keahlian Audit
X3 = Lingkup Audit
e = Standar Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan terhadap auditor BPK RI Perwakilan Papua Barat dengan jumlah sampel sebanyak 35 responden. Data diambil menggunakan kuesioner yang telah lulus uji validitas dan reabilitas. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menyebarkan 42 kuesioner secara langsung kepada auditor yang berada di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat. Namun jumlah kuesioner yang datanya lengkap dan dapat digunakan hanya berjumlah 35 kuesioner. Berikut adalah gambaran umum responden dalam penelitian ini.



Pada Gambar 4.1 menjelaskan responden berdasarkan jenis kelamin. Dari 35 responden, sebanyak 28 responden (80%) berjenis kelamin laki–laki dan sisanya sebanyak 7 responden (20%) berjenis kelamin perempuan sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki–laki.



Pada Gambar 4.2 di atas menjelaskan bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya, responden dengan tingkat pendidikan Strata Satu (S1) atau sarjana berjumlah 30 responden (85,71%), sedangkan untuk tingkat Pendidikan Strata Dua Dan Tiga, masing-masing berjumlah 3 responden (8,57%) serta 2 responden (5,72%). Sehingga dapat dikatakan sebagian besar responden penelitian memiliki tingkat pendidikan strata satu atau sarjana.



Pada Gambar 4.3 menjelaskan responden berdasarkan lamanya bekerja, bahwa sebagian besar responden dalam penelitian memiliki masa kerja 5 sampai 10 tahun dengan jumlah 20 responden (57,14%) sedangkan untuk dengan masa kerja kurang dari 5 tahun berjumlah 10 responden (28,57%) dan untuk responden dengan masa kerja di atas 10 tahun memiliki jumlah 5 responden (14,29 %).

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Independensi	35	18,00	27,00	22,571	2,6154	6,840
Keahlian Audit	35	37,00	48,00	42,629	3,1908	10,182
Lingkup Audit	35	14,00	20,00	17,200	1,9373	3,753
Opini Audit	35	40,00	50,00	45,400	3,0602	9,365
<i>Valid N (listwise)</i>						

Pada tabel 2 di atas menunjukkan nilai independensi memiliki nilai minimum sebesar 18,00 dan nilai maksimalnya 27,00 dengan rata-rata 22,57 serta nilai standar deviasinya 2,62 dan variannya sebesar 6,84. Keahlian audit memiliki nilai terendah sebesar 37,00 dan nilai tertinggi sebesar 48,00 dengan rata-rata sebesar 42,63, *standard deviation* sebesar 3,19, dan *variance* 10,182. Untuk variabel lingkup audit memiliki nilai terendah sebesar 14,00 dan nilai tertinggi sebesar 20,00 dengan nilai rata-rata sebesar 17,20 *standard deviation* sebesar 1,94 dan *variance* 3,753. *Variance* opini audit laporan keuangan memiliki nilai terendah sebesar 40,00 dan nilai tertinggi 50,00 dengan nilai rata-rata sebesar 45,400 dengan *standard deviation* sebesar 3,0602 dan *variance* sebesar 9,365.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah berdistribusi secara normal atau tidak. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 3 dimana nilai signifikasinya lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal.

Tabel 3 Uji Normalitas

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		35
<i>Normal Parameters</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	0,75524773
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,128
	<i>Positive</i>	0,128
	<i>Negative</i>	-0,088
<i>Kolmogorov – Smirnov Z</i>		0,128
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,162

Uji Multikoleneearitas

Uji multikoleneearitas dalam penelitian digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Menurut Ghazali (2013), multikoleneearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Untuk menunjukkan tidaknya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF < 10$. Pada tabel 4 hasil uji multikoleneearitas menunjukkan nilai bahwa variabel independen tidak terdapat multikoleneearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Coleniarity Statistic</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Independensi	0,139	7,195
Keahlian Audit	0,135	7,392
Lingkup Audit	0,216	4,625

Uji Heterokedastisitas

Uji *gletser* digunakan dalam penelitian untuk mendeteksi heterokedastisitas dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari heterokedastisitas, artinya dalam model regresi tidak terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pada tabel 4.4 merupakan hasil dari uji heterokedastisitas dalam penelitian. Dimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikoleneearitas dalam model regresi.

Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	<i>Unstandardized coefficients</i>		<i>Standardized coefficients</i>	
	B	<i>Std.Error</i>	Beta	t
1	(constant)	1,171	1,476	0,793
	Independensi	-0,068	0,092	-0,734
	Keahlian Audit	-0,058	0,077	-0,757
	Lingkup Audit	0,195	0,100	0,712
				1,956
				0,060

Uji Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Hasil regresi berganda dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients		Sig.
	B	Std.Error	Beta	t	
(constant)	11,679	2,227		5,245	0,000
Independensi	0,296	0,139	0,253	2,129	0,041
Keahlian Audit	0,460	0,116	0,480	3,981	0,000
Lingkup Audit	0,431	0,151	0,273	2,864	0,007

Dari tabel 6 di atas, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut.

$$Y = 11,679 + 0,296X1 + 0,460 X2 + 0,431 X3 + e$$

Hasil pengujian regresi linier berganda dapat dijelaskan, bahwa nilai konstanta bernilai positif, menunjukan bahwa opini audit sebesar 11,679. Untuk Independensi memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,296 yang memiliki arti bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap variable independensi maka opini audit atas laporan keuangan akan bertambah sebesar 0,296. Untuk keahlian audit memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,46 yang artinya bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap keahlian audit maka, opini audit atas laporan keuangan akan bertambah sebesar 0,460. Sedangkan lingkup audit memiliki nilai koefisien positif sebesar 0,431 yang memiliki arti bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap lingkup audit maka opini audit atas laporan keuangan akan bertambah sebesar 0,431

Uji Koefisien Determinasi

Menurut Ghazali (2011), koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut.

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,969 ^a	0,939	0,933	0,7909

Pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,933 artinya sebesar 93,3% opini audit atas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel independennya seperti keahlian audit dan lingkup audit. Sedangkan sisanya sebesar 6,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

Hipotesis 1 menyatakan bahwa independensi auditor berpengaruh terhadap pertimbangan auditor dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan. Dari tabel 6 di atas, dapat kita lihat bahwa independensi auditor memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dengan nilai signifikasinya sebesar 0,041 sehingga dapat dikatakan hipotesis H1 dapat diterima. Auditor yang memiliki Independensi yang tinggi pasti menghasilkan opini audit yang baik artinya auditor tidak dipengaruhi oleh pihak manapun dan tidak terikat dengan pihak manapun juga sehingga opini audit yang diberikan sepenuhnya untuk kepentingan umum. Hasil penelitian ini pun sama dikemukakan oleh Hasyim (2013) dan Siregar (2012) bahwa independensi berpengaruh terhadap pertimbangan auditor dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa keahlian audit pengaruh terhadap pertimbangan auditor dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan. pada tabel 6, terdapat keahlian audit memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau dengan kata lain memiliki nilai 0,000 sehingga dapat dikatakan hipotesis H2 dapat diterima. Keahlian audit merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang independen dalam bekerja sebagai tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi serta pengetahuan dan ketrampilan yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Hasil penelitian ini pun konsisten dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Unisa (2015) yang menyatakan bahwa keahlian audit berpengaruh terhadap pertimbangan auditor dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa lingkup audit pengaruh terhadap pertimbangan auditor dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan. Dari tabel 6 di atas, dapat kita lihat bahwa keahlian audit memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau dengan kata lain memiliki nilai 0,007 sehingga dapat dikatakan hipotesis H3 dapat diterima. lingkup audit berpengaruh positif terhadap pertimbangan pemberian opini audit sebab untuk mencapai tujuan pemeriksaan, tim pemeriksa harus mengumpulkan bukti-bukti audit yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan pendapat mereka atas laporan keuangan tersebut. Dalam pengumpulan bukti-bukti audit, auditor sering menemukan kendala pembatasan terhadap lingkup audit. Adanya pembatasan lingkup audit mengharuskan auditor memberikan pengecualian di dalam pendapatnya atau pernyataan tidak memberikan pendapat. Hasil penelitian ini pun konsisten dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Hasyim (2013), yang menyatakan bahwa lingkup audit berpengaruh terhadap pertimbangan auditor dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan.

KESIMPULAN

Independensi, keahlian audit, dan lingkup audit berpengaruh terhadap pertimbangan auditor dalam pemberian opini audit atas laporan keuangan di BPK RI Perwakilan Papua Barat, artinya bahwa opini yang dihasilkan atas sebuah laporan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, tidak terikat oleh pihak manapun, dan sepenuhnya untuk kepentingan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Dalam menjalankan tugasnya auditor telah memiliki keahlian audit yang memadai agar opini yang dilasikan akan lebih tepat dan akurat sehingga tidak menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan. Lingkup audit berkaitan dengan pemeriksaan audit dalam menggumpulkan bukti-bukti audit yang mana berkaitan langsung dengan tujuan dari audit tersebut. Adanya pembatasan terhadap lingkup audit baik yang dilakukan oleh klien maupun keadaan lain seperti batas waktu pemeriksaan, kegagalan memperoleh bukti yang cukup dan lain-lain akan mempengaruhi auditor dalam memberikan opini audit.

Keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independent dalam penelitian yaitu variabel keahlian audit dan lingkup audit, sehingga untuk penelitian berikutnya dapat dikembangkan dengan cara menambah beberapa variabel-variabel lain di luar penelitian ini, seperti: *judgment*, konsistensi dalam penerapan PABU dan lain-lain. Dengan menggunakan metode analisis yang berbeda dan populasi yang berbeda agar dapat di peroleh hasil yang berbeda pula.

DAFTAR REFERENSI

- Arens, alvin A. Elder, Randal J. Beasley, Mark S. 2008. *Auditing dan jasa Assurance*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ghozali, Imam. 2011. *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Universitas Dipenogoro.
- Hasyim, Wahid, 2013. Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam pemberian Opini Audit atas Laporan Keuangan (Studi pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan). Skripsi tidak dibuplicasi. Universitas Hasanudin.
- Http://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorial/2638-opini-semu-auditor-bpk
- Jaafar, H.T Redwan dan Sumiyati. 2005. *Kode Etik dan Standar Audit, Diklat pembentukan auditor terampil, pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan BPKP*. Jakarta.
- Konrath. 2005. *Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach*. Jakarta: Selemba Empat.
- Mayangsari, Sekar. 2003. “Pengaruh Keahlian Audit dan Independensi terhadap pendapat audit: sebuah kuasai Eksperimen”. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. 6 (1:1-23). Yogyakarta
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua : Yogyakarta.

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua: Yogyakarta.
- Mulyadi. 2011. Auditing Buku 1. Jakarta: Selemba Empat.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. 2010. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 2007. Jakarta: Badan Pemeriksaan Keuangan.
- Prasetyanto, Iwan Antonius, 2011. Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Hasil Opini Audit (Studi Empiris pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah). Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Semarang
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta
- Siregar, Silky Raditya. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pertimbangan Opini Auditor Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Accounting Analysis Journal, 1(2).
- Suartana, Wayan. 2010. *Akuntansi keperilakuan: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Andi
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Swarjana, I. K., & SKM, M. (2022). *Populasi-Sampel, Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*. Penerbit Andi.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No.15 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Unisa, Arta Ifany. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi auditor dalam pemberian opini audit laporan keuangan (studi pada auditor di BPK perwakilan Provinsi Riau). Skripsi tidak dipublikasikan. Universitas Riau.